

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT PESISIR DALAM
MENGELOLA SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DI KECAMATAN SAMATIGA
KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

AFRIZAL MR
06C10404025



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT**

2013

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT PESISIR DALAM
MENGELOLA SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DI KECAMATAN SAMATIGA
KABUPATEN ACEH BARAT**

AFRIZAL MR
06C10404025

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian
Pada Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar*

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2013**

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul : Pengembangan Masyarakat Pesisir dalam mengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut di Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat.

Nama : AFRIZAL MR
NIM : 06C10404025
Program Studi : Agribisnis

**Menyetujui;
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota

Ir. Said Mahjali, MM
NIDN: 0110116502

Dahnil Muljadi, SP
NIDN: 0109038201

Mengetahui;

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Prodi Agribisnis

Diswandi Nurba, S.TP.,M.Si
NIDN: 0128048202

Yoga Nugroho, SP.,MM
NIDN:

Tanggal Kelulusan : 10 Oktober 2013

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul :

“Pengembangan Masyarakat Pesisir dalam Mengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat”

Yang disusun Oleh :

Nama : **AFRIZAL MR**
NIM : **06C10404025**
Program Studi : Agribisnis
Fakultas : Pertanian Universitas Teuku Umar

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 10 Oktober 2013 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Ir. Said Mahjali, MM
Pembimbing I/Ketua Tim Penguji
2. Dahnil Muljadi, SP
Pembimbing II
3. Yoga Nugroho, SP.,MM
Penguji Utama
4. Meiza Aulia, SP
Penguji Anggota

Meulaboh, 10 Oktober 2013
Ketua Prodi Agribisnis

Yoga Nugroho, SP.,MM

Meulaboh 10 Oktober 2013
Ketua Prodi Agribisnis
Yoga Nugroho, STP,MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Di sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati; sumber daya buatan; serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Potensi-potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Wilayah pesisir secara ekologis merupakan daerah pertemuan antara ekosistem darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian tanah, baik yang kering maupun yang terendam air laut, dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, ombak dan gelombang serta perembesan air laut. Yang ke arah laut mencakup bagian perairan laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar dari sungai maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan, pembuangan limbah, perluasan permukiman serta intensifikasi pertanian (Anggoro, S , 2004).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar. Namun, selama ini potensi laut tersebut belum termanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa pada umumnya, dan pemasukan devisa negara khususnya. Bahkan, sebagian besar hasil pemanfaatan laut selama ini justru “lari” atau “tercuri” ke luar negeri oleh para nelayan asing yang memiliki perlengkapan modern dan beroperasi hingga

perairan Indonesia secara ilegal. Dalam konteks inilah upaya pemanfaatan laut Indonesia secara maksimal tidak saja tepat tetapi juga merupakan suatu keharusan. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah pemanfaatan laut yang bagaimana?, Seharusnya adalah pemanfaatan laut yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat secara lestari. Dalam konteks inilah kerjasama dalam pengelolaan potensi sumberdaya tersebut sangat diperlukan, karena yang diinginkan bukan saja peningkatan hasil pemanfaatan laut, tetapi juga pemerataan hasil pemanfaatan yang dinikmati seluas - luasnya oleh masyarakat (Lippitt *et. al.*, 2002).

Ketertinggalan dan keterbelakangan sebagian masyarakat pesisir jika dibandingkan dengan potensi Sumber daya pesisir yang dimiliki dapat diteliti dari berbagai segi, salah satunya adalah dari perilaku nelayan dan masyarakat pesisir lain dalam mengelola Sumber daya pesisir tersebut. Penelitian ini mengungkap berbagai faktor yang terkait dengan perilaku masyarakat pesisir dalam mengelola Sumber daya pesisir di Kecamatan Samatiga. Pemanfaatan sumber daya alam yang manaati asa kelestarian diharapkan dapat menjamin ketersediaan Sumber daya pesisir di masa sekarang dan masa yang akan datang (Anggoro, 2004).

Masalah utama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah adanya kesenjangan antara kepercayaan publik (*public trust*) seperti konservasi jangka panjang stok perikanan dan lingkungan ekologi dengan adanya keinginan tertentu dari pengguna “pemodal kuat” yang akan mengeksplotasi sumber daya tersebut (O’Connor, 2004).

Terdapat dua faktor utama yang berkontribusi terhadap perilaku nelayan memanfaatkan Sumber Daya Pesisir, yaitu faktor internal dan eksternal nelayan.

Perilaku positif nelayan merupakan perilaku yang conform, yakni mengikuti prinsip ekonomi dan konservasi, sedangkan perilaku negatif adalah kegiatan destruktif yang akan berakibat buruk bagi kelestarian sumber daya alam.

Penduduk Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar kelima di dunia, yaitu lebih kurang 220 juta jiwa. Lebih kurang 60 persen diantaranya hidup dan bermukim di sekitar wilayah pesisir. Sebagian besar diantaranya menggantungkan hidup kepada keberadaan sumberdaya alam pesisir dan lautan. Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian besar kegiatan dan aktivitas sehari-harinya selalu berkaitan dengan keberadaan sumberdaya di sekitarnya (Kusnadi, 2002).

Wilayah pesisir dan laut Indonesia mempunyai kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiversity) terbesar di dunia, yang tercermin pada keberadaan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan berjenis-jenis ikan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Kondisi tersebut tentu sebuah ironi, di tengah gemerlapnya kekayaan alam nan melimpah ternyata Indonesia belum mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat disekitarnya yaitu masyarakat pesisir. Besarnya potensi sektor kelautan seharusnya mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia namun kenyataannya masyarakat pesisir masih merupakan masyarakat miskin baik secara kultural maupun struktural (Kusnadi, 2002).

Salah satu penyebabnya adalah banyak pihak termasuk elit penguasa yang tidak mau bertanggungjawab terhadap kepentingan mereka dalam mengeruk sumberdaya lingkungan laut. Selain itu, penyebab yang timbul dari masyarakat setempat adalah ekosistem sumber alam lingkungan laut yang telah mengalami

degradasi sebagai akibat eksploitasi sumberdaya perikanan yang tidak ramah lingkungan dan terkendali.Keawaman masyarakat tersebut adalah tantangan bagi para ahli untuk memperbaiki strategi hidup dan kearifan lokal masyarakat setempat. Oleh karena itu, semakin terasa bahwa untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pemahaman sosiologi masyarakat pesisir. Sosiologi masyarakat pesisir ini direkonstruksi dari basis sumberdaya dan bersumber pada aktivitas masyarakat yang terkait dengan sumberdaya alam lingkungan laut.

Masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang khas, yang dihadapkan langsung dengan keadaan ekosistem yang keras, dan sumber kehidupan yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut (Sumber Daya Pesisir). Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, masih terbelit oleh persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan kesulitan mengakses berbagai layanan publik. Terdapat persoalan tertentu yang terkait dengan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi sehingga masyarakat di kawasan pesisir masih tertinggal (Hanson, 2004).

Persoalan rendahnya kualitas kehidupan masyarakat pesisir dialami pula di pesisir pantai barat Aceh Barat, yakni di wilayah Kecamatan Samatiga. Pesisir Kecamatan Samatiga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan pantai sepanjang 144 km, dengan potensi lestari 12538 ton ikan per tahun. Produksi perikanan laut Kecamatan Samatiga pada tahun 2009/2011 mencapai 8432 ton ikan per tahun atau 67.25 persen dari total potensi lestari (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2004).

Berkaitan dengan masalah perilaku tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

(1) mengungkap perilaku masyarakat pesisir, khususnya nelayan, dalam

mengelola Sumber daya pesisir berdasarkan hasil analisis kritis terhadap berbagai variabel yang berhubungan dengan perilaku tersebut, (2) menjelaskan faktor-faktor pembentuk perilaku pengelola Sumber daya pesisir yang mempengaruhi kondisi Sumber daya pesisir dan kesejahteraan, dan (3) menghasilkan model pengembangan masyarakat yang relevan dengan tipologi masyarakat pesisir di Kecamatan Samatiga.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Potensi sumberdaya alam pesisir dan laut apa saja yang terdapat di Kecamatan Samatiga dan sejauhmana tingkat pemanfaatannya.
- 1.2.2 Nilai-nilai kearifan apa saja yang terdapat pada masyarakat pesisir di Kecamatan Samatiga yang mempunyai hubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut?
- 1.2.3 Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya pesisir dan laut di Kecamatan Samatiga?.

1.3 Pendekatan Masalah

Permasalahan pengelolaan pesisir dan laut selama ini terjadi karena pola pendekatan pembangunan yang kurang mengakomodasi dan mengintegrasikan potensi lokal baik sumberdaya alam pesisir maupun sumberdaya manusia termasuk nilai-nilai kearifan lokal/tradisional.

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir yang dilaksanakan selama ini sering bersifat parsial dan berpola “*top-down*”, sehingga sering kali kurang atau bahkan tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, tidak berpola “*bottom-up*”, sedang dalam implementasinya kurang mendayagunakan potensi yang ada secara optimal termasuk nilai-nilai atau kearifan lokal.

Pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir yang berbasis pada sumber daya lokal akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan potensi sumberdaya. Dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan dan pelestarian sumberdayanya.

Pemanfaatan sumberdaya yang kurang maksimal sampai saat ini, antara lain dikarenakan masih terdapat kendala yaitu skala usaha yang rata-rata kecil di bawah skala ekonomis, kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, kurangnya penguasaan teknologi serta tingkat pemanfaatan sumberdaya yang kurang merata dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.

Keikutsertaan masyarakat dari awal dalam menentukan permasalahan akan lebih memastikan bahwa program yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan yang demikian juga membuat masyarakat ikut merasa memiliki dan bertanggung jawab pada program tersebut sehingga lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk ikut mengelola sumberdaya yang mereka miliki. Pada gilirannya metode

pendekatan ini akan menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pemerintah.

1.4 Tujuan

Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

- 1.4.1 Mengidentifikasi karakteristik sumberdaya kelautan dan kondisi wilayah pesisir di Kecamatan Samatiga.
- 1.4.2 Mengidentifikasi dan menelaah berbagai kendala dan permasalahan yang muncul sehubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan wilayah pesisir.
- 1.4.3 Menyusun program dan rekomendasi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan wilayah pesisir.

1.5 Manfaat

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran akan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir. Dengan adanya upaya tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir baik sosial maupun ekonomi. Selain itu, secara bersama-sama dapat menjaga lingkungan alam laut dari berbagai dampak yang dapat mengancam kelestariannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Wilayah Pesisir

Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia seperti pertanian dan pencemaran (Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau Kecil, 2003).

Dahuri, dkk. (1996) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, dimana batas ke arah darat adalah jarak secara arbiter dari rata-rata pasang tertinggi dan batas ke arah laut adalah yurisdiksi wilayah propinsi atau state di suatu negara. Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut. Secara fisiologi didefinisikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas dan kadang materinya berupa kerikil. Ruang kawasan pesisir merupakan ruang wilayah diantara ruang daratan

dengan ruang lautan yang saling berbatasan. Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan termasuk perairan darat dan sisi darat dari garis terendah. Ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai sisi laut pada garis laut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Dalam cakupan horizontal, wilayah pesisir di batasi oleh dua garis hipotetik. Pertama, ke arah darat wilayah ini mencakup daerah-daerah dimana proses-proses oseanografis (angin laut, pasang-surut, pengaruh air laut dsbnya) yang masih dapat dirasakan pengaruhnya. Kedua, ke arah laut meliputi daerah-daerah dimana akibat proses-proses yang terjadi di darat (sedimentasi, arus sungai, pengaruh air tawar dsbnya). Wilayah perbatasan ini mempertemukan lahan darat dan masa air yang berasal dari daratan yang relatif tinggi (elevasi landai, curam atau sedang) dengan masa air laut yang relatif rendah, datar, dan jauh lebih besar volumenya. Karakteristik yang demikian oleh Ghofar (2004), mengatakan bahwa secara alamiah wilayah ini sering disebut sebagai wilayah jebakan nutrient (*nutrient trap*). Akan tetapi, jika wilayah ini terjadi pengrusakan lingkungan secara massif karena pencemaran maka wilayah ini disebut juga sebagai wilayah jebakan cemaran (*pollutants trap*). Dengan demikian dapat dimengerti bahwa berbagai sumberdaya hayati serta lingkungan di wilayah pesisir relatif lebih rentan terhadap kerusakan, dibandingkan dengan wilayah-wilayah atau ekosistem-ekosistem lainnya. Dari seluruh tipe ekosistem yang ada, biasanya ekosistem pesisir merupakan wilayah yang mendapatkan tekanan lingkungan yang paling berat (Kay dan Alder, 1999) dalam Ghofar (2004).

Sebagai negara kepulauan, tidaklah mengherankan jika lebih kurang dua pertiga dari luas keseluruhan teritorial negara kesatuan yang berbentuk republik ini merupakan perairan, dengan luas lebih kurang 5,8 juta km². Lingkungan alam laut tersebut banyak mengandung sumber alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia diantaranya pasir, kerikil, kerang, bakau, ikan, dan sebagainya. Namun, pada kenyataannya Bangsa Indonesia belum bisa menjadi bangsa yang maju meskipun kekayaan sumberdaya yang berada di laut sangat melimpah dan potensi dari kekayaan laut tersebut dapat diberdayakan oleh penduduk sekitar demi meningkatkan taraf hidup mereka di masa mendatang. Oleh karena itu, demi menjaga keberlanjutan sumberdaya tersebut, maka perlu kiranya dirancang dan diimplementasikan rambu-rambu atau batasan-batasan eksploitasi disesuaikan dengan keberadaan sumberdaya, zonasi dan karakteristik sumberdaya serta karakteristik daerahnya sebagai satuan wilayah pembangunan.

Banyak diantaranya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pesisir menjadi suatu komunitas yang terbelakang atau bahkan terisolasi sehingga masih jauh untuk menjadikan semua masyarakat setempat sejahtera. Dilihat dari faktor internal masyarakat pesisir kurang terbuka terhadap teknologi dan tidak cocoknya pengelolaan sumberdaya dengan kultur masyarakat setempat. Untuk melihat setiap dimensi dari masyarakat pesisir, berikut akan dijelaskan terlebih Berdasarkan pendapat Nikijuluw dalam Dietrieck (2001), “Masyarakat pesisir itu dahulu, Apa yang dimaksud dengan masyarakat pesisir itu? dan seperti masyarakat pesisir itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut

dan pesisir”. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier factor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa transportasi dan lain-lain.

Setiap komunitas memiliki karakteristik kebudayaan yang berbeda-beda. Untuk memperjelas perbedaan masyarakat pesisir dengan yang lain, berikut matriks masyarakat berdasarkan unsure pengikat sosial sosial yang terjadi pada suatu komunitas.

2.2 Wilayah Pesisir Indonesia

Sebagai negara kepulauan, tidaklah mengherankan jika lebih kurang dua pertiga dari luas keseluruhan teritorial negara kesatuan yang berbentuk republik ini merupakan perairan, dengan luas lebih kurang 5,8 juta km². Lingkungan alam laut tersebut banyak mengandung sumber alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia diantaranya pasir, kerikil, kerang, bakau, ikan, dan sebagainya. Namun, pada kenyataannya Bangsa Indonesia belum bisa menjadi bangsa yang maju meskipun kekayaan sumberdaya yang berada di laut sangat melimpah dan potensi dari kekayaan laut tersebut dapat diberdayakan oleh penduduk sekitar demi meningkatkan taraf hidup mereka di masa mendatang, Oleh karena itu, demi menjaga keberlanjutan sumberdaya tersebut, maka perlu kiranya dirancang dan diimplementasikan rambu-rambu atau batasan-batasan eksploitasi disesuaikan dengan keberadaan sumberdaya, zonasi dan karakteristik sumberdaya serta karakteristik daerahnya sebagai satuan wilayah pembangunan.

2.3 Klasifikasi Masyarakat

Pendapat Redfield maka karakteristik sosial masyarakat pesisir berada pada setiap komunitas. Namun, kebanyakan masyarakat pesisir merupakan tipe komunitas desa petani dan desa terisolasi. Desa terisolasi diantaranya para nelayan yang tidak punya akses dan hanya mengabdikan dirinya kepada sumber laut.

Karakteristik sosial masyarakat pesisir berada pada setiap komunitas. Namun, kebanyakan masyarakat pesisir merupakan tipe komunitas desa petani dan desa terisolasi. Desa terisolasi diantaranya para nelayan yang tidak punya akses dan hanya mengabdikan dirinya kepada sumber laut.

Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris atau petani. Dari segi penghasilan, petani mempunyai pendapatan yang dapat dikontrol karena pola panen yang terkontrol sehingga hasil pangan atau ternak yang mereka miliki dapat ditentukan untuk mencapai hasil pendapatan yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya didominasi dengan nelayan. Nelayan bergelut dengan laut untuk mendapatkan penghasilan, maka pendapatan yang mereka inginkan tidak bisa dikontrol. “nelayan menghadapi sumberdaya yang bersifat open acces dan beresiko tinggi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat pesisir seperti nelayan memiliki karakter yang tegas, keras, dan terbuka” (Satria, 2002).

2.4 Karakteristik Masyarakat

Selain itu, karakteristik masyarakat pesisir dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya, aspek pengetahuan, kepercayaan (teologis), dan posisi nelayan sosial. Dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat pesisir mendapat pengetahuan dari

warisan nenek moyangnya misalnya mereka untuk melihat kalender dan penunjuk arah maka mereka menggunakan rasi bintang. Sementara, dilihat dari aspek kepercayaan, masyarakat pesisir masih menganggap bahwa laut memiliki kekuatan *magic* sehingga mereka masih sering melakukan adat pesta laut atau sedekah laut. Namun, dewasa ini sudah ada dari sebagian penduduk yang tidak percaya terhadap adat-adat seperti pesta laut tersebut. Mereka hanya melakukan ritual tersebut hanya untuk formalitas semata. Begitu juga dengan posisi nelayan sosial, pada umumnya, nelayan bergolong kasta rendah.

Secara sosiologis, masyarakat pesisir memiliki ciri yang khas dalam hal struktur sosial yaitu kuatnya hubungan antara patron dan klien dalam hubungan pasar pada usaha perikanan. “Biasanya patron memberikan bantuan berupa modal kepada klien. Hal tersebut merupakan taktik bagi patron untuk mengikat klien dengan utangnya sehingga bisnis tetap berjalan” (Satria, 2002). Dari masalah utang piutang tersebut sering terjadi konflik, namun konflik yang mendominasi adalah persaingan antar nelayan dalam memperebutkan sumberdaya ikan yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya pihak yang dapat mengembangkan sumberdaya laut dan mengatur pengelolaannya.

Dalam hal ini peranan aktif LSM sangat membantu dalam mengarahkan strategi pembangunan yang diperlukan masyarakat pesisir dan menunjang pengelolaan sumberdaya lingkungan laut di sekitar tempat tinggal mereka misalnya budidaya perikanan. Pengelolaan ini dilakukan dengan kegiatan nyata yang sesuai dengan warna dari kultur masyarakat setempat. Selain itu LSM harus mampu memberikan masukan dan kritikan bagi strategi pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir.

2.5 Potensi Sumberdaya Alam Pesisir

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa- jasa lingkungan yang sangat kaya (Clark, 2006). Kekayaan ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan mendorong berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya binaan/buatan dan jasa- jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir.

Dahuri (1999) menyatakan bahwa potensi sumberdaya pesisir secara umum dibagi atas empat kelompok yakni (1) sumberdaya yang dapat pulih (*renewable resources*), (2) sumberdaya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), (3) energi kelautan dan (4) jasa-jasa lingkungan kelautan (*environmental services*).

Sumberdaya yang dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, padang lamun, mangrove, terumbu karang termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (*marine culture*). Ketersediaan lahan pesisir merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perikanan. Demikian juga dengan wilayah perairan pantainya dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan budidaya terutama budidaya laut.

Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sumberdaya energi terdiri dari OTEC (*Ocean Thermal Energy Conservation*), pasang surut, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah

pariwisata dan perhubungan laut.

Wilayah pesisir dan laut sebagai ekosistem yang dinamis memiliki karakteristik yang sangat unik. Keunikan wilayah ini mengisyaratkan pentingnya pengelolaan wilayah tersebut untuk dikelola secara terpadu dan bijaksana. Secara biofisik wilayah pesisir memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Secara empiris terdapat keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas (*upland*) dengan laut lepas. Perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir, cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Begitu pula halnya jika pengelolaan kegiatan pembangunan (industri, pertanian, pemukiman, dan lain- lain) di lahan atas (*upland*) suatu DAS (Daerah Aliran Sungai) tidak dilakukan secara bijaksana akan merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan pesisir dan laut.
2. Dalam suatu kawasan pesisir, biasanya terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. Terdapat keterkaitan langsung yang sangat kompleks antara proses-proses dan fungsi lingkungan dengan pengguna sumberdaya alam.
3. Dalam suatu kawasan pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat (orang) yang memiliki keterampilan/keahlian dan kesenangan (*preference*) bekerja yang berbeda sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga dan sebagainya. Pada hal sangat sukar atau

hampir tidak mungkin untuk mengubah kesenangan bekerja (profesi) sekelompok orang yang sudah mentradisi menekuni suatu bidang pekerjaan.

4. Baik secara ekologis maupun secara ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur (*single use*) adalah sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha. Misalnya suatu hamparan pesisir hanya digunakan untuk satu peruntukan, seperti tambak, maka akan lebih rentan, jika hamparan tersebut digunakan untuk beberapa peruntukan.
5. Kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumberdaya milik bersama (*common property resources*) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (*open access*). Pada hal setiap sumberdaya pesisir biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan. Oleh karenanya, wajar jika pencemaran over eksploitasi sumberdaya alam dan konflik pemanfaatan ruang seringkali terjadi di kawasan ini, yang pada gilirannya dapat menimbulkan suatu tragedi bersama (*open tragedy*).

Kawasan pesisir memiliki tiga habitat utama (vital) yakni mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Di antara ketiga habitat tersebut terdapat hubungan dan interaksi yang saling mempengaruhi. Kerusakan yang terjadi pada satu habitat akan mempengaruhi kehidupan biota pada habitat lainnya, sehingga pengelolaan pada suatu habitat harus mempertimbangkan kelangsungan habitat lainnya.

2.6 Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

Pengelolaan sumberdaya alam adalah usaha manusia dalam mengubah ekosistem untuk memperoleh manfaat semaksimal mungkin bagi kepentingan manusia, dengan mengupayakan kesinambungan produksi dan menjamin kelestarian sumberdaya tersebut (Afiati, 1999).

Pengelolaan perikanan yang baik dan bertanggung jawab terutama perikanan tangkap haruslah benar-benar memperhatikan daya dukung sumberdaya perikanan di wilayah perairan Indonesia, bahkan Purwanto (2003), secara eksplisit mengungkapkan bahwa apabila sumberdaya ikan laut yang hidup dalam wilayah perairan Indonesia dimanfaatkan secara benar dan bertanggungjawab yaitu tidak melebihi daya dukungnya, sumberdaya tersebut akan dapat menghasilkan produksi maksimum lestari sekitar 6,4 juta ton pertahun. Selain itu masyarakat Indonesia juga memiliki peluang untuk memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas (*high sea*). Sebaliknya bila sumberdaya ikan tersebut dimanfaatkan melebihi daya dukungnya, kelestarian sumberdaya ikan akan terancam dan produksinya akan menurun.

Ketersediaan (stok) sumberdaya ikan pada beberapa daerah penangkapan (*fishing ground*) di Indonesia ternyata telah dimanfaatkan melebihi daya dukungnya sehingga kelestariannya terancam. Beberapa spesies ikan bahkan dilaporkan telah sulit didapatkan bahkan nyaris hilang dari perairan Indonesia (Purwanto, 2003). Lebih lanjut dikatakan pula bahwa ancaman ini diperkirakan akan meningkat pada dekade ini, karena terjadi pergeseran daerah penangkapan armada perikanan dunia ke daerah yang masih potensial, termasuk perairan Indonesia, baik secara legal maupun ilegal.

Pengelolaan Sumberdaya alam pesisir pada hakekatnya adalah suatu

proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan (Supriharyono, 2002).

Dalam pengelolaan lingkungan sumberdaya alam pesisir tidaklah bersifat serta merta atau latah, namun kita perlu mengkaji secara mendalam isu dan permasalahan mengenai sumberdaya yang hendak dilakukan pengelolaan. Penting atau tidaknya sumberdaya alam yang ada, potensi dan komponen sumberdaya mana yang perlu dilakukan pengelolaan dan apakah terdapat potensi dampak perusakan lingkungan, serta untung atau tidaknya sumberdaya tersebut bagi masyarakat merupakan pertimbangan penting dalam pengelolaan. Pengelolaan sumberdaya alam yang beranekaragam, baik di daratan maupun di lautan perlu dilakukan secara terpadu dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dalam pola pembangunan berkelanjutan (Rais, 1997).

Pengelolaan sumberdaya alam pesisir dilakukan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan dan daya dukung lingkungan yang tersedia. Secara ideal pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan hidupnya harus mampu menjamin keberlangsungan fungsi ekologis guna mendukung keberlanjutan usaha perikanan pantai yang ekonomis dan produktif. Keberlanjutan fungsi ekologis akan menjamin eksistensi sumberdaya serta lingkungan hidup ikan (Anggoro, 2004).

Menurut Supriharyono (2000), beberapa pertimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam kawasan pesisir yakni meliputi (a) pertimbangan ekonomis, (b) pertimbangan dari aspek lingkungan dan (c) pertimbangan sosial

budaya. Pertimbangan ekonomis menyangkut penting tidaknya untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, penghasil barang-barang yang dapat dipasarkan, merupakan aset lokal, nasional atau internasional serta merupakan aset pariwisata yang dapat menghasilkan uang selain berupa barang. Pertimbangan lingkungan menyangkut stabilitas fisik pantai, lingkungan masyarakat yang unik, penyediaan stok hewan dan tumbuhan termasuk yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan, pelestarian plasma nutfah, estetika dan identitas budaya, serta apakah terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sedimentasi, konstruksi, pertanian, penebangan, penambangan, penangkapan berlebihan (*overfishing*), eutrofikasi karena buangan limbah yang mengandung nutrisi, dan kontaminasi oleh berbagai macam limbah. Sedangkan pertimbangan sosial budaya meliputi pengakuan tradisi, nilai sosial budaya, mempertahankan tradisi generasi yang akan datang, sasaran keagamaan. Pemanfaatan kawasan pesisir dan lautan secara berkelanjutan (*sustainable*) harus dilakukan secara bertanggung jawab (*responsible*), sehingga diperlukan perencanaan pengelolaan yang sangat hati-hati (Ghofar, 2004). Dewasa ini, sayangnya, pengetahuan yang memadai mengenai proses-proses yang terjadi di kawasan pesisir dan lautan Indonesia belum tersedia secara memadai untuk suatu tujuan pemanfaatan yang rasional. Sebagai akibatnya adalah konsep dan teknik pengelolaan perikanan kawasan pesisir dan lautan sebagian besar belum teruji. Selain degradasi lingkungan, beberapa isu penting lainnya adalah lemah atau masih rendahnya partisipasi masyarakat, sistem hukum dan penegakannya, keamanan di laut, pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

2.7 Isu-Isu Strategis dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut

Dengan semakin mencuatnya paradigma pembangunan kelautan serta dilaksanakannya otonomi daerah, maka semakin terbaca beberapa persoalan serius yang menjadi isu-isu strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut ini, yaitu:

1. Kondisi sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat *common property* (milik bersama) dengan akses yang bersifat *quasi open access*. Istilah *common property* ini lebih mengarah pada kepemilikan yang berada dibawah kontrol pemerintah atau lebih mengarah pada sifat sumberdaya yang merupakan *public domain*, sehingga sifat sumberdaya tersebut bukanlah tidak ada pemiliknya. Ini berarti sumberdaya tersebut tidak terdefiniskan dalam hal kepemilikannya sehingga menimbulkan gejala yang disebut dengan *dissipated resource rent*, yaitu hilangnya rentai sumberdaya yang semestinya diperoleh dari pengelolaan yang optimal. Dengan adanya sifat sumberdaya yang *quasi open access* tersebut, maka tindakan salah satu pihak yang merugikan pihak lain tidak dapat terkoreksi oleh pasar (*market failure*). Hal ini menimbulkan ketidak efisienan ekonomi karena semua pihak akan berusaha mengeksploitasi sumberdaya sebesar-besarnya, jika tidak maka pihak lain yang akan mendapat keuntungan. Kondisi seperti inilah yang terjadi saat ini. Dengan didukung oleh teknologi, pihak-pihak yang lebih kuat dan mampu mengeksploitasi sumberdaya secara berlebihan sehingga terjadi hukum rimba (siapa yang kuat, dia yang menang) dan daya produksi alamiah menjadi terganggu. Adanya degradasi lingkungan pesisir dan laut. Pada

awal tahun 80-an, banyak pihak yang tersentak setelah menyaksikan kebijakan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan produktivitas ternyata telah menimbulkan kerusakan yang serius terhadap lingkungan. Program modernisasi perikanan contohnya, yang bertujuan meningkatkan produksi hasil tangkapan nelayan menggunakan teknologi penangkapan yang semakin modern tidak disertai dengan sosialisasi pemahaman yang baik terhadap lingkungan kelautan. Hal ini berakibat fatal terhadap kelestarian lingkungan karena terjadi eksploitasi sumberdaya secara maksimal tanpa memperhatikan potensi lestari yang ada.

2. Degradasi lingkungan pesisir dan laut yang menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir dan nelayan akibat faktor-faktor lain masih berlanjut hingga saat ini seperti misalnya pencemaran lingkungan perairan akibat limbah industri dan rumah tangga. Selain merusak potensi sumberdaya perairan, degradasi lingkungan ini juga berakibat buruk bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, terutama masyarakat pesisir. Yang paling vital adalah nelayan kecil yang merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya. Mereka hidup dalam kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai faktor alamiah dan non alamiah. Faktor alamiah berkaitan dengan fluktuasi musim dan struktur alamiah sumberdaya ekonomi desa. Sedangkan faktor non alamiah berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi, ketimpangan dalam sistem bagi hasil, tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya

jaringan pemasaran, tidak berfungsinya koperasi nelayan yang ada, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang ada. Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan buruh telah memberikan kontribusinya terhadap akumulasi kekayaan ekonomi pada sebagian kecil masyarakatnya yang memiliki alat produksi serta pihak yang menguasai modal dan pasar.

3. Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan kehidupan yang melanda rumah tangga nelayan buruh tidak memungkinkan anggota keluarganya terlibat aktif dalam tanggung jawab sosial di luar permasalahan kehidupan yang substansial bagi mereka. Faktor yang demikian sering menjadi alasan bagi pihak lain untuk menilai secara negatif perilaku sosial masyarakat nelayan. Persepsi seperti ini hanya melestarikan kesenjangan hubungan sosial dalam relasi politik antara pemerintah dan masyarakat nelayan.
4. Kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perikanan di Indonesia melibatkan banyak *stakeholders*. Yang paling vital adalah nelayan kecil yang merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya. Mereka hidup dalam kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai faktor alamiah dan non alamiah. Faktor alamiah berkaitan dengan fluktuasi musim dan struktur alamiah sumberdaya ekonomi desa. Sedangkan faktor non alamiah berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi, ketimpangan dalam sistem bagi

hasil, tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya jaringan pemasaran, tidak berfungsinya koperasi nelayan yang ada, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang ada. Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan buruh telah memberikan kontribusinya terhadap akumulasi kekayaan ekonomi pada sebagian kecil masyarakatnya yang memiliki alat produksi serta pihak yang menguasai modal dan pasar.

5. Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan kehidupan yang melanda rumah tangga nelayan buruh tidak memungkinkan anggota keluarganya terlibat aktif dalam tanggung jawab sosial di luar permasalahan kehidupan yang substansial bagi mereka. Faktor yang demikian sering menjadi alasan bagi pihak lain untuk menilai secara negatif perilaku sosial masyarakat nelayan. Persepsi seperti ini hanya melestarikan kesenjangan hubungan sosial dalam relasi politik antara pemerintah dan masyarakat nelayan. Dalam jangka panjang, hal ini tidak menguntungkan untuk mendorong perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan reorientasi model kepemimpinan dan sasaran perencanaan pembangunan agar lebih kontekstual dan partisipatif.
6. Akses pemanfaatan teknologi yang terbatas. Semakin tingginya persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir, menuntut masyarakat untuk memaksimalkan produksi mereka. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan penggunaan teknologi. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan teknologi ini menjadi

salah satu kendala dan pemicu adanya eksploitasi sumberdaya yang merusak potensi lestari dan berdampak negatif bagi lingkungan. Salah satu contohnya adalah penggunaan bom ikan dan potasium sianida untuk menangkap jenis-jenis ikan dengan nilai ekonomis tinggi di habitat terumbu karang telah merusak dan menimbulkan pencemaran lingkungan yang parah. Contoh lain adalah adanya kesenjangan penggunaan teknologi antara nelayan besar dan tradisional yang berakibat pada makin terdesaknya nelayan tradisional dalam persaingan pemanfaatan sumberdaya laut, sehingga banyak yang beralih profesi menjadi buruh nelayan atau buruh bangunan.

7. Peraturan dan kebijakan yang kurang kondusif. Dengan lahirnya aturan main yang menyangkut hak kepemilikan sumberdaya pada tingkat lokal, secara tidak langsung akan memberikan hak kepemilikan (*property rights*) kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengelola sumberdaya pesisir dan laut secara lebih rasional mengingat ketersediaan sumberdaya akan menentukan tingkat kemakmuran masyarakat di daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan perikanan yang dijalankan seharusnya tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi (khususnya peningkatan devisa negara dari ekspor hasil laut), tetapi juga diimbangi secara proporsional dengan komitmen menjaga kelestarian sumberdaya perikanan yang ada. Disamping itu, harus pula ada komitmen yang tinggi dan konsisten dalam menegakkan peraturan hukum yang berlaku agar dapat menghindari terjadinya konflik-konflik sosial dan ekonomi. Kearifan lokal harus dapat diakomodir sebagai salah

satu pranata hukum yang dapat memperkecil terjadinya konflik antar nelayan. Salah satu bentuk akomodasi kearifan lokal ini adalah melalui penyusunan tata ruang wilayah pesisir. Hingga saat ini masih belum banyak daerah dan kawasan pesisir yang memilikinya sehingga belum memiliki kesamaan misi dari berbagai pengaturan dan kebijakan yang dibuat untuk pengelolaan sumberdaya tersebut.

2.8 Permasalahan Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Keterbelakangan dan kemiskinan bukanlah cerita baru bagi masyarakat pesisir. Berdasarkan ukurannya, kemiskinan dibagi menjadi dua kemiskinan absolute dan kemiskinan relative (Satria, 2002). Kemiskinan absolute adalah masyarakat yang secara alamiah benar-benar miskin berdasarkan ketentuan ukurannya. Sementara itu, kemiskinan relative merupakan kemiskinan dari suatu kelompok pendapatan bila dibandingkan dengan kelompok pendapatan lainnya. Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir. Ketertinggalan ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu : kemiskinan struktural, kemiskinan super-struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu (Nikijuluw dalam Die, 2006).

Kemiskinan kultural terjadi karena faktor internal, nelayan miskin karena kurangnya modal dan keterbatasan teknologi dan manajemen bahkan karena sifat malas yang dimiliki oleh nelayan yang menyebabkan dia miskin. Berbeda dengan kemiskinan cultural yang timbul dari intern, kemiskinan struktural terjadi karena faktor eksternal misalnya adanya hambatan bagi mobilitas vertikal nelayan, tidak adanya dukungan dari pemerintah atau hubungan patron-klien yang masih bersifat asimetris. Aspek struktural menyebabkan lemahnya posisi nelayan atau pembudidaya ikan dalam pemasaran. Proses tawar-menawar menyebabkan para nelayan sangat lemah dan tidak berdaya karena hasil produksi mereka yang masih minim. Selain itu, desakan kebutuhan yang memaksa nelayan untuk menerima tawaran harga dari pasar meskipun harga tersebut sangat merugikan nelayan. Sehingga kajian tentang pemberdayaan untuk mengatasi masalah para nelayan, kemiskinan dan keterbelakangan sangatlah penting.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat (Wahyono, 2001). Program pemberdayaan masyarakat adalah program yang seluruhnya melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan berbasis masyarakat karena pihak luar hanya sebatas mendampingi dan memberikan alternative pemecahan masalah bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk melakukan pemberdayaan maka harus ada pengetahuan yang luas dan penguatan sistem lokal sehingga ide dan gagasan para nelayan patut didengarkan dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data, baik data primer maupun data sekunder dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh data dan informasi melalui dua cara antara lain yaitu ;

3.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dipergunakan dalam penelitian ini mulai dari penulisan proposal, konsultasi sampai pada penyelesaian ujian dan finalisasi penulisan skripsi ini adalah selama 5 bulan terhitung dari bulan Oktober 2011 sampai Februari 2012.

3.3 Tempat Penelitian (Field Research)

Setelah mempertimbangkan karakteristik wilayah dari berbagai informasi dari narasumber, maka peneliti menentukan lokasi Kecamatan Samatiga. Pemilihan desa pun sangat tergantung pada informasi tokoh kunci (*key person*) mengenai ada tidaknya Pengelolaan Masyarakat Pesisir dalam mengelola Sumber daya Pesisir dan laut di Kecamatan Samatiga. Untuk mendapatkan data primer dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengadakan penelitian lapangan ke objek penelitian yaitu: pada masyarakat pesisir Kecamatan Samatiga.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.4.1 Wawancara (Interview)

Merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi langsung ke objek penelitian yaitu dengan pihak-pihak Responden. Responden dalam penelitian ini masyarakat pesisir, panglima Laot, Camat dan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) yang mempunyai kaitannya dengan masalah-masalah dalam penyusunan skripsi ini pada Kantor Camat Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

3.4.2 Observasi (Pengamatan)

Merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat dan mengamati langsung yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan dan yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

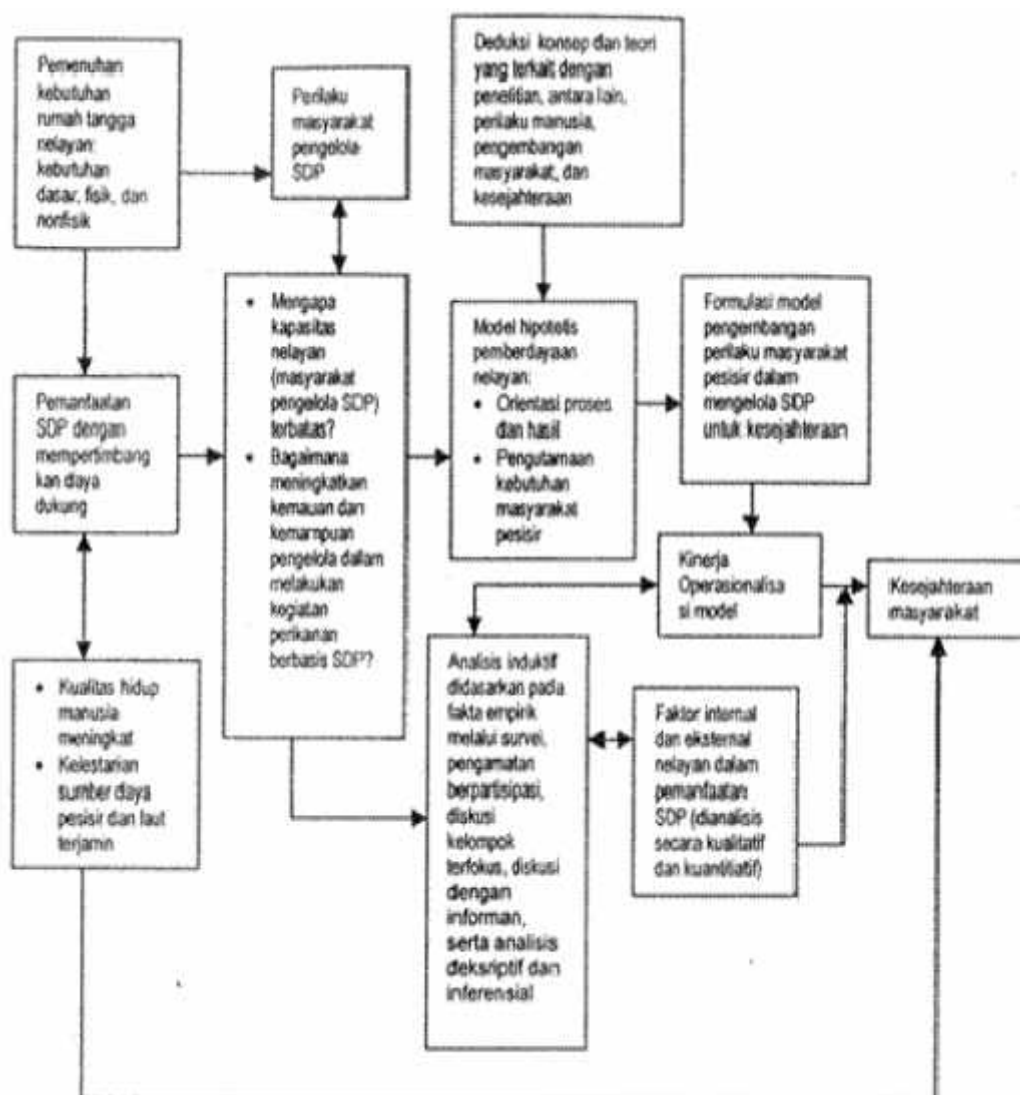
3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, dimana data-data dan informasi yang diperoleh dilapangan, dikumpulkan, diolah dan dotabulasikan dalam bentuk tabelaris, kemudian dianalisis kembali sesuai dengan kebutuhan analisis data dalam penulisan skripsi ini.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dan eksplanori dengan menggunakan landasan pemikiran penelitian bahwa perilaku masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Pesisir dan kondisi Sumber Daya Pesisir dapat berkontribusi terhadap kesejahteraannya. Alur berpikir logis dari penelitian ditampilkan pada Gambar 1. Penelitian dilakukan pada tiga lokasi gampoeng di pesisir Kecamatan

Samatiga, yaitu (1) Gampoeng Kuala Bubon dengan jarak 26 km di Barat Kota Meulaboh, (2) Gampoeng Suak Timah yang berada di wilayah pusat pemerintahan, yang berjarak lebih kurang 22 km dari Kabupaten Aceh Barat Meulaboh dan (3) Gampoeng Lhok Bubon yang berjarak lebih kurang 30 km.

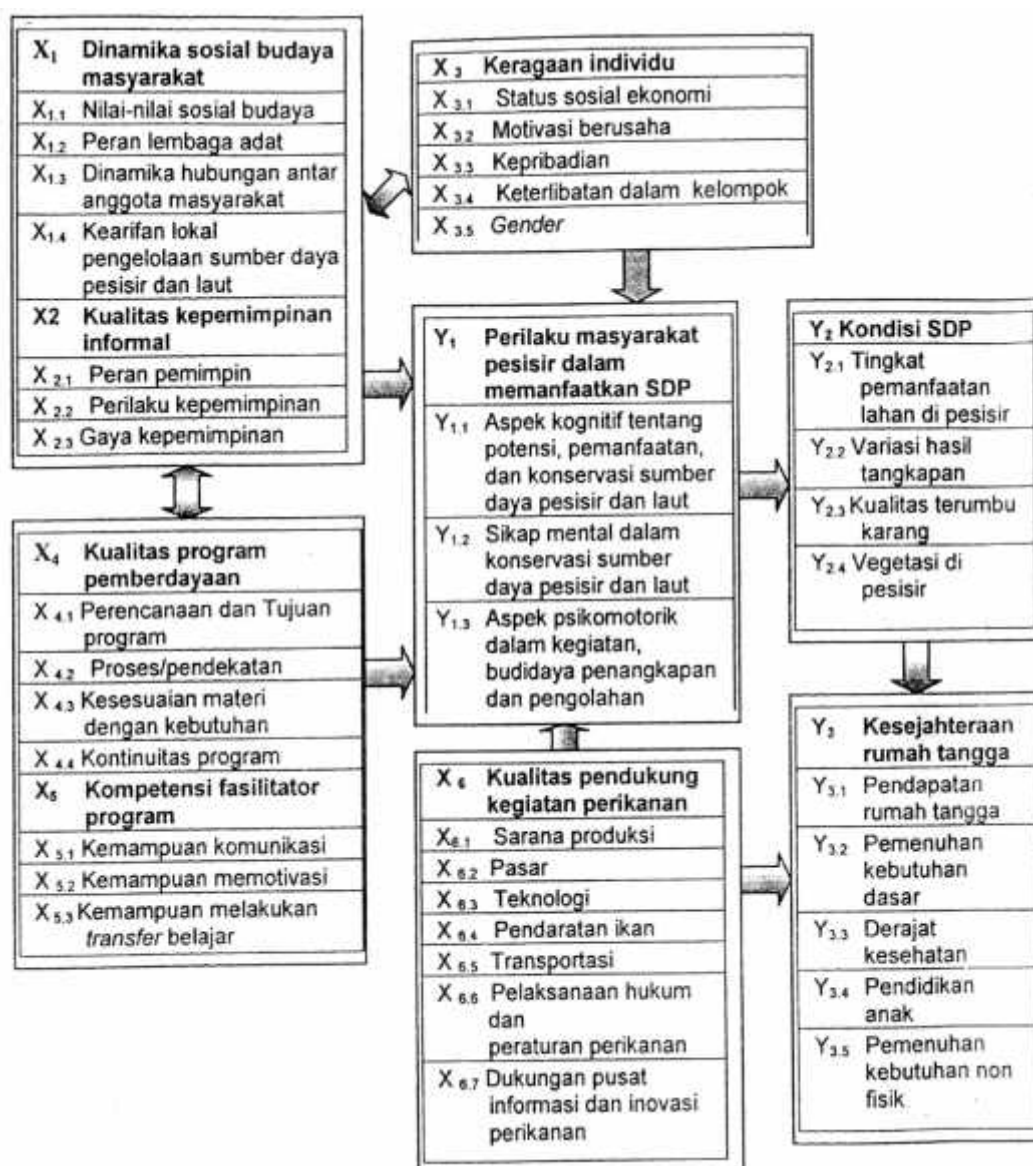
Populasi penelitian adalah masyarakat pesisir pada lokasi tersebut yang melakukan kegiatan usaha perikanan yang berjumlah 155 orang. Masyarakat pesisir yang diwawancarai berjumlah 29 orang, terdiri dari nelayan, pengolah, pembudi daya dan pemasar.



Gambar 1. Alur berpikir logis konteks yang diteliti dan proses penelitian

Agar dapat menggambarkan kondisi yang serupa pada tiap gampoeng dipilih responden yang memiliki kegiatan perikanan yang sama di tiap gampoeng, yaitu nelayan penangkap ikan konsumsi, pengolah, dan pemasar (155 orang). Selain dari responden sampel, informasi diperoleh pula dari informan yang berjumlah 12 orang yang terdiri dari 2 orang penyuluh, 4 orang pemuka masyarakat, 4 orang pengurus kelompok, dan 2 orang fasilitator program.

Model yang dibangun dari metode deduktif dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kemungkinan analisis hubungan antar variabel (Gambar 2). Variabel tersebut adalah dinamika sosial budaya masyarakat (X_1); kualitas kepemimpinan informal (X_2), keragaan individu (X_3), kualitas program pemberdayaan (X_4) kompetensi fasilitator program (X_5), kualitas pendukung



Gambar 2. Keterkaitan antar variabel dalam mendesain Model Pengembangan Masyarakat Pesisir untuk meningkatkan Kesejahteraan.

Digunakan beberapa teori dan konsep sebagai basis analisis temuan empirik penelitian, antara lain, teori dan konsep perilaku, teori tentang perubahan berencana (Lippit *et al.*, 2001), konsep pengembangan komunitas (Rothman, 1974; Ife, 2005), dan konsep belajar dari pengalaman (Kolb, 2004). Perilaku yang diharapkan dapat dimiliki oleh masyarakat pesisir melalui pengembangan masyarakat ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perilaku Masyarakat Pesisir dalam Mengelola Sumber Daya Pesisir

Unsur-unsur Perilaku	Perilaku yang terlalu bergantung	Perilaku berdaya yang diharapkan
1. Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang memahami potensi Sumber Daya Pesisir yang dapat dimanfaatkan - Berprinsip bahwa Sumber Daya Pesisir dapat dieksplotasi terus-menerus tanpa disertai pemulihan - Adanya pemahaman bahwa kegiatan di darat tidak berpengaruh terhadap Sumber Daya Pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami potensi sumber daya alam dan akses terhadap pemanfaatannya secara optimal - Berprinsip bahwa kelestarian Sumber Daya Pesisir perlu dijaga - Mengetahui adanya keterkaitan antara kegiatan di darat dan dilaut
2. Sikap mental Respons terhadap pemanfaatan dan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> - Apriori terhadap kerusakan pesisir dan laut - Berorientasi ke masa lalu dan sulit menerima perubahan - Enggan mengambil resiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktif mencari terobosan teknologi pemanfaatan yang ramah lingkungan - Orientasi masa depan dan terbuka terhadap perubahan - Melakukan perhitungan terhadap resiko dan ketidakpastian
3. Keterampilan Kemampuan memanfaatkan Sumber Daya Pesisir menjadi berbagai usaha dengan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlalu bergantung pada satu jenis usaha karena keterbatasan keterampilan - Menggunakan alat tangkap tanpa peduli terhadap dampak lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan diversifikasi usaha - Menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan (mendukung pelestarian lingkungan) - Melakukan usaha konservasi di lingkungan

disertai upaya pemulihan sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mampu memelihara kondisi Sumber Daya Pesisir - Ada keterbatasan dalam mengolah dan memasarkan hasil 	<p>pesisir dan laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengolah dan memasarkan hasil atau ketersediaan pasar bagi distribusi produk
--------------------------------------	--	--

Sumber : data Primer (diolah 2012)

Dalam konteks dinamika sosial budaya, telah diidentifikasi ciri-ciri masyarakat dengan kapasitas pengelolaan Sumber Daya Pesisir rendah dan tinggi.

Hal ini dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Identifikasi Nilai - nilai Sosial budaya dalam Mengelola Sumber Daya Pesisir

Indikator sosial budaya	Kapasitas pengelolaan rendah (<i>exploitative</i>)	Kapasitas pengelolaan tinggi (<i>environmental friendly</i>)
1. Peran Sumber Daya Pesisir bagi kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya konversi minim, belum memanfaatkan Sumber Daya Pesisir secara tepat, usaha terlalu berorientasi ke darat 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimal, masyarakat pesisir dapat memanfaatkan Sumber Daya Pesisir untuk berbagai bidang usaha disertai upaya konservasi.
2. Aturan lokal untuk mengawasi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - Belum atau tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada dan diterapkan secara konsisten di masyarakat
3. Kegiatan bersama seperti gotong royong	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada kegiatan yang bersifat konsumtif 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembang dan mendukung di semua segi kehidupan
4. Hubungan sosial antar masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - Belum berkembang, cenderung bersifat deprivasi hak lapisan bawah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat jaringan kerja sama yang saling menguntungkan
5. Peran pemimpin	<ul style="list-style-type: none"> - Didominasi oleh pihak luar 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemimpin informal dihormati dan dipatuhi

	informal		<i>(legitimate)</i>
6.	Kegiatan upacara untuk menghormati laut sebagai sumber kehidupan	- Ada, tetapi kurang penghayatan (sebatas ceremonial)	- Ada dan berlangsung rutin secara khidmat sebagai rasa syukur atas hasil yang diperoleh

Sumber : data Primer (diolah 2012)

Pemikiran tentang program pemberdayaan yang tidak mampu mengembangkan atau dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih sejahtera ditampilkan pada tabel 3. Melalui model yang dibangun dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan program pemberdayaan yang relevan dengan kondisi spesifik pesisir.

Tabel 3. Pemikiran tentang Program Pemberdayaan dan Kemampuan Fasilitator

Kriteria	Kurang memberdayakan	Memberdaya	
A. Program Pemberdayaan			
1.	Inisiasi dan tujuan program	- Menghasilkan kebergantungan	- Program diinisiasidari sistem sosial masyarakat (kebutuhan), penetapan tujuan oleh masyarakat, difasilitasi oleh lembaga terkait
2.	Materi Program	- Fokus pada masalah cara atau teknologi produksi	- Program dirancang secara terpadu
3.	Kegiatan	- Donasi (pembagian sumbangan)	- Penguatan kapasitas masyarakat
4.	Proses	- Berpusat pada pemerintah atau sponsor - Pendekatan searah - Bias sasaran	- Berpusat pada individu, kelompok, dan masyarakat lokal - Multi pendekatan - Melibatkan berbagai <i>stakeholders</i>
B. Fasilitator Program			
1.	Peran	- Menggurui	- Belajar bersama

	fasilitator		(suasana demokratis), berbagi pengalaman
2.	Kompetensi fasilitator	- Belum maksimal dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mengembangkan potensi masyarakat	- Tinggi dalam kemampuan teknis dan non teknis
3.	Monitoring dan evaluasi	- Tidak terprogram	- Terprogram, tolak ukur keberhasilan jelas
4.	Keberlanjutan	- Rendah/kurang inovatif	- Tinggi, masyarakat memiliki daya inovatif yang tinggi
5.	Tolak ukur	- Fisik semata (produktivitas)	- Fisik dan nonfisik
6.	Penggunaan sumber daya lokal	- Rendah	- Tinggi

Sumber : data Primer (diolah 2012)

Data Penelitian dikumpulkan melalui observasi wawancara terstruktur, diskusi dengan nara sumber, dan penelusuran Informasi skunder. Instrumen penelitian adalah kuesioner dengan menggunakan skala pengukuran Likert *semantic differential Osgood*, metode Guttman, skala Thurstone skala nilai sesuai dengan karakteristik variabel yang diukur. Skala pengukuran tersebut dapat digunakan untuk mengukur perilaku individu atau kelompok (Oppenheim, 2006) Hasil uji coba kuesioner pada 15 anggota masyarakat pesisir menunjukkan nilai koefisien validitas 0.5420 hingga 0.874 dan koefisien reliabilitas Cronbach 0.6170 hingga 0.8750. Nilai koefisien tersebut nyata ($\alpha = 0.05$), ini berarti kuesioner layak untuk digunakan.

Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Uji statistik parametrik dengan menggunakan data yang telah ditransformasi dan uji statistik non parametrik digunakan untuk menganalisis data

kualitatif dan menguji hipotesis penelitian. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menjelaskan fenomena perilaku yang sulit dikuantifikasikan dan mengelaborasi hasil analisis kualitatif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Umum Wilayah

Kecamatan Samatiga merupakan salah satu kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat yang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bubon
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Arongan Lambalek
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Hindia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Johan Pahlawan.

4.2 Iklim dan Jenis Tanah

Berdasarkan curah hujan rata-rata 2.664 mm/tahun dengan rata-rata 128 hari hujan/tahun, dengan temperature 22° C s/d 32°C. Distribusi curah hujan umumnya hampir merata

Berdasarkan topografi maka luas wilayah kerja BPP Samatiga mempunyai topografi datar dan berbukit dengan ketinggian 0 s/d 10 m dpl. Jenis tanah berdasarkan peta geologi terbentuk dari bahan endapan marine dan *AluviaL*. *Pada daerah yang terkena tsunami kadar garam sangat tinggi. Pada daerah perbukitan jenis tanah berwarna coklat kemerahan sebahagian besar berwarna kuning.*

4.3 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia yang ada dikecamatan Samatiga secara umum masih kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk dan tingkat pendidikan Masyarakat Kecamatan Samatiga. Jumlah

penduduk menurut golongan umur dikecamatan Samatiga disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur di Kecamatan Samatiga, Tahun 2012.

No	Golongan Umur	Jumlah (orang)	%
1.	0 – 10	2.042	20
2.	11 – 20	2.132	21
3.	21 – 30	2.787	27
4.	31 – 40	3.426	34
5.	41 – 50	2.709	27
6.	51 – 60	1.577	15
7.	> 60	789	7
Total		14.673	100

Sumber: BPP Samatiga, Tahun 2010

Berdasarkan Tabel 1 diatas, diketahui bahwa Kecamatan Samatiga memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.673 jiwa, dengan kelompok umur terbesar adalah berumur 31 s/d 40 Tahun (34 %), sedangkan kelompok umur terkecil adalah umur diatas 60 tahun dan 51 – 60 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa SDM di kecamatan Samatiga cukup potensial ditinjau dari usia.

4.4 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Penduduk di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat berjumlah 14.673 jiwa, baik itu perempuan maupun laki – laki (BPS Kecamatan

Samatiga,2010). Penduduk di daerah tersebut melakukan berbagai aktifitas usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, dalam bentuk usaha kerja, penerapan skill, dan juga dalam bentuk menentukan jenis mata pencaharian dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penduduk di Kecamatan Samatiga merupakan penduduk yang berdomisili di desa, sebagian besar penduduk di Kecamatan Samatiga bermata pencaharian di sektor pertanian seperti diterangkan pada tabel 5. berikut ini

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Nomor	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani	3.621	24,68
2	Pekebun	1.739	11,85
3	Peternak	844	5,75
4	Nelayan	467	3,18
5	Lain-lain	8.011	54,60
Jumlah		14.673	100,00

Sumber: BPP Kecamatan Samatiga, Tahun 2010

Tabel 5 diatas menjelaskan bahwa mata pencaharian utama penduduk kecamatan samatiga adalah petani yaitu sebanyak 3.621 orang (24,68 %) dan Pekebun sebanyak 1.739 orang (11,85 %). Sedangkan matapencaharian sebagai nelayan hanya 467 orang (3,18 %).

4.5 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pengaruh pentingnya pendidikan di Kecamatan Samatiga sudah sangat terasa, hal ini terbukti lulusan SLTA sudah sangat dominan dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Aceh Barat bahkan lulusan sarjana setiap tahun semakin meningkat didaerah tersebut. Untuk lebih jelas, jumlah penduduk

menurut tingkat pendidikan masyarakat kecamatan Samatiga disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kecamatan Samatiga Menurut Pendidikan

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	4.206	28,66
2	Tamat SD	3.005	20,48
3	Tamat SLTP	3.425	23,34
4	Tamat SLTA	3.216	21,92
5	Tamat Akademi/D3	319	2,17
6	Perguruan Tinggi	502	3,42
Jumlah		14.673	100,00

Sumber: BPP Samatiga, Tahun 2012

Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa Tingkat pendidikan Masyarakat Kecamatan Samatiga umumnya tidak tamat SD sebanyak 4.206 orang (28,66%) dan disusul oleh tamat SLTP yaitu sebanyak 3.425 orang (23, 34%) dan tamat SLTA sebanyak 3.216 orang (21,92 %). Sedangkan Penduduk yang berpendidikan Perguruan Tinggi hanya 502 Orang (3,42 %) dan Akademi 319 Orang (2,17 %).

4.6 Dinamika Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat pesisir dilokasi penelitian termasuk dalam kategori masyarakat pesisir tradisional yang dicirikan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir secara subsisten, penggunaan teknologi penangkapan sederhana, yakni terbanyak menggunakan motor tempel dengan kekuatan mesin 5 PK, bahkan terdapat pelayar tanpa armada, yakni hanya menggunakan pancing. Hal ini dikarenakan nelayan umumnya masih memiliki kegiatan lain terutama bertani dan menawarkan jasa penyewaan perahu pada wisatawan. Masyarakat pesisir khususnya di Kecamatan Samatiga tidak memiliki sawah, sedangkan di Kecamatan Tejakula menggantungkan hidup pada usaha di bidang perikanan

mengingat sebagian besar masyarakat pesisir di Kecamatan Samatiga tidak memiliki sawah, sedangkan di Kecamatan Tejakula kondisi lahan sangat kering dan kurang subur sehingga kegiatan penangkapan ikan merupakan alternatif utama. Masyarakat pesisir di Kecamatan Samatiga memiliki intensitas kegiatan usaha berbasis Sumber Daya Pesisir yang paling beragam jika dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya. Kecamatan tersebut meliputi penangkapan, pengolahan, budi daya tambak, budi daya laut, dan wisata bahari

Dinamika sosial budaya masyarakat merupakan kondisi yang memungkinkan masyarakat pesisir menerapkan nilai-nilai kehidupan dalam berinteraksi dengan segenap anggota masyarakat, berupa adanya lembaga atau pranata pada lokalitas setempat yang mengatur hubungan antar manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Dinamika sosial budaya berperan penting dalam memanfaatkan potensi bahari. Analisis dinamika sosial budaya masyarakat di wilayah pesisir penelitian dilihat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir diperlihatkan pada tabel 7.

Secara umum, ketiga unsur dinamika sosial budaya, yaitu nilai-nilai sosial budaya, peran lembaga adat, dan dinamika hubungan sosial menunjukkan kriteria yang tinggi. Skor dinamika sosial variabel secara keseluruhan adalah 76 persen dan, nilai maksimum yang dapat dicapai. Untuk indikator nilai-nilai budaya, masyarakat pesisir di Kecamatan Samatiga mencapai median skor paling tinggi di antara ketiga kecamatan. Pada indikator peran lembaga adat dan kearifan lokal pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Kecamatan Samatiga mencapai median skor tertinggi di antara tiga lokasi penelitian.

Tabel 7. Nilai tengah skor Indikator Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Pesisir di Lokasi Penelitian

Indikator (selang skor)	Gampong			Kabupaten (% dari skor maksimum)
	Suak Timah	Kuala Bubon	Lhok Bubon	
Nilai-nilai sosial budaya (9-36)	27	27	28	28 (78)
Peran lembaga adat (4-16)	13	13	12	12 (75)
Dinamika hubungan antar anggota masyarakat (5-20)	15	15	14	15 (80)
Kearifan lokal pengelolaan Sumber Daya Pesisir (4-16)	14	12	12	12 (75)
Dinamika sosial budaya (0-100)	78	78	75	76

Keterangan : n=168 : angka yang ditampilkan adalah nilai tengah tiap skor indikator/variabel

Hasil uji *Chi Square* memperlihatkan adanya hubungan yang nyata dinamika sosial budaya dengan wilayah pesisir. Implikasi hal ini adalah karakteristik pesisir berhubungan dengan dinamika sosial budaya masyarakatnya. Upaya pengembangan masyarakat perlu di adaptasikan dengan karakteristik masyarakat setempat dan tidak dapat diseragamkan, sejalan dengan konsep pembangunan berpusat pada manusia (Korten, 2004). Upaya penyeragaman sangat bertentangan dengan aspirasi masyarakat.

Nilai-nilai sosial budaya masyarakat Aceh sangat kuat, dan mengutamakan keseimbangan. Pada masyarakat Aceh, dikenal budaya *tulak bala* yang bergantung pada keharmonisan yang tercipta antara Ciptaan Allah, manusia, dan lingkungan. Dalam akar kepercayaan Islam, manusia merupakan dunia kecil, yang berkaitan dengan alam yang lebih besar dan saling berinteraksi satu sama lain. Alam perlu dihormati dan dijaga keseimbangannya perilaku merusak alam

berarti mengkhianati interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan alam dalam konteks Sumber Daya Pesisir dikelola masyarakat pesisir setempat melalui peraturan tertulis local yang dikomandoi oleh panglima Laot (*hukom laot*). Dalam ketentuan tersebut menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Nelayan yang menerangkan berbagai aspek dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir termasuk jumlah hari penangkapan, pemantauan penangkapan oleh nelayan, dan upaya rehabilitasi Sumber Daya Pesisir seperti peremajaan tanaman penahan yang ditanam dibibir pantai yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swadaya masyarakat. Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam konformitas dan penyimpangan terhadap aturan lokal.

4.7 Pengembangan Masyarakat Pesisir Dalam Mengelola Sumber Daya Pesisir

Hasil analisis deskriptif menggambarkan bahwa pada lingkup kabupaten, sikap mental responden 76.8 persen mencapai kriteria yang tinggi (Tabel 8). Dititik per lokasi, ternyata di Kecamatan Samatiga 92.7 persen responden memiliki sikap mental dalam kategori yang tinggi.

Tabel 8. Sebaran Responden menurut Perilaku dalam Mengelola Sumber Daya Pesisir

Indikator (selang skor)	Kriteria	Desa							
		Suak Timah		Kuala Bubon		Lhok Bubon			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kognitif (4-16) Median 12	Rendah	24	43.6	20	45.0	18	45.0	62	36.9
	Tinggi	31	56.4	53	55	22	55.0	106	63.1
	Jumlah	55	100.0	73	100.0	40	100.0	168	100.0
Sikap mental (4-16) Median 14	Rendah	4	7.3	32	43.8	30	20.0	39	23.2
	Tinggi	51	92.7	41	56.2	37	80.0	129	76.8
	Jumlah	55	100.0	73	100.0	40	100.0	168	100.0
Keterampilan (5-20) Median 13	Rendah	12	21.8	32	43.8	8	20.0	52	31.0
	Tinggi	43	78.2	41	56.2	32	80.0	116	69.0
	Jumlah	55	100.0	73	100.0	40	100.0	168	100.0
Perilaku (13-52) Median 38	Rendah	21	38.2	36	49.3	16	40.0	73	43.5
	Tinggi	32	61.8	37	50.7	24	60.0	95	56.5
	Jumlah	55	100.0	73	100.0	40	100.0	168	100.0

Perilaku nelayan berhubungan secara sangat nyata ($\alpha=0.01$) dengan dinamika sosial budaya masyarakat, kualitas kepemimpinan, dan keragaan responden. Terdapat hubungan nyata ($\alpha=0.05$) antara perilaku nelayan dengan kompetensi fasilitator dan kualitas pendukung kegiatan perikanan. Secara rinci nilai koefisien korelasi *rank-Spearman* ditampilkan pada Tabel Lampiran.

Hasil analisis jalur memperlihatkan bahwa variabel dinamika sosial budaya masyarakat dan program pemberdayaan berpengaruh secara nyata terhadap perilaku masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Pesisir dengan nilai koefisien lintas (selanjutnya disingkat c) berturut-turut sebesar 0.117 dan 0.718 (Tabel 9). Variabel bebas lainnya memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak nyata terhadap perilaku. Meskipun demikian, pengaruh variabel lain tetap harus dipertimbangkan mengingat hubungan antarvariabel dalam model memiliki korelasi 0.793 dengan nilai R^2 sebesar 0.628

Tabel 9. Nilai koefisien korelasi dan lintas langsung berbagai variabel terhadap perilaku masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Pesisir

Variabel	Koefisien lintas	Korelasi	
		Total	Parsial
Dinamika sosial budaya (X_1)	0.117*	0.250	0.162
Kualitas kepemimpinan (X_2)	0.047	0.262	0.064
Keragaan responden (X_3)	0.035	0.227	0.051
Kualitas Program (X_4)	0.718**	0.770	0.745
Kompetensi fasilitator (X_5)	0.079	0.203	0.125
Kualitas pendukung kegiatan (X_6)	0.045	0.220	0.068

Keterangan: n=168; ** nyata pada $\alpha = 0.01$; * nyata pada $\alpha = 0.05$

Wilayah Kecamatan Samatiga merupakan wilayah yang masyarakatnya sangat bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan hasil kebun. Adanya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan yang ramah lingkungan ditanggapi positif oleh nelayan khususnya di Gampong Samatiga. Nelayan di Gampong Samatiga ini dapat melatih tentang pengawetan ikan dan penangkapan ikan secara ramah lingkungan dengan metode belajar dari pengalaman dan metode partisipatoris.

Pengaruh perilaku nelayan terhadap kondisi Sumber Daya Pesisir memiliki nilai $c = 0.122$ dan pengaruh kesejahteraan terhadap kondisi Sumber Daya Pesisir adalah nyata dengan nilai $c=0.338$. Kondisi Sumber Daya Pesisir dipengaruhi secara nyata oleh kompetensi fasilitator ($c=0.691$) dan kesejahteraan ($c=0.138$); kondisi Sumber Daya Pesisir berpengaruh positif secara nyata terhadap kesejahteraan ($c=0.327$). Hasil uji lintas pengaruh keseluruhan indikator variabel bebas terhadap kesejahteraan menunjukkan adanya tiga faktor yang berpengaruh positif secara nyata terhadap kesejahteraan, yaitu nilai sosial budaya ($c=0.291$), gaya kepemimpinan ($c=0.178$); dan pemanfaatan lahan dipesisir untuk kegiatan produktif ($c=0.262$). Nilai-nilai koefisien lintas tersebut memiliki makna

bahwa kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan salah satu faktor yang dapat menjamin kondisi Sumber Daya Pesisir. Pengembangan masyarakat pesisir menuju kesejahteraan diawali oleh kesadaran masyarakat untuk berubah, didukung pengembangan nilai sosial budaya, gaya kepemimpinan yang sesuai, dan diversifikasi usaha di kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan kondisi fisik lingkungan. Perilaku masyarakat pesisir dalam mengelola Sumber Daya Pesisir secara ekologis, sosial dan ekonomi dapat dikembangkan melalui penerapan penyuluhan oleh fasilitator yang kompeten dengan menggunakan pendekatan sosial budaya, dukungan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan Sumber Daya Pesisir, dan dilakukan secara kontinyu. Fakta empirik memperlihatkan bahwa fasilitator yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang alat tangkap ikan ramah lingkungan, dengan aspek teknik lainnya, disertai kemampuan berkomunikasi dan memotivasi individu atau kelompok masyarakat yang didampingi, dapat dengan mudah menstimulasi terjadinya perubahan perilaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Karakteristik masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Pesisir pesisir di lokasi penelitian termasuk dalam katagori masyarakat pesisir tradisional, yang dicirikan oleh penggunaan teknologi penangkapan dan pengolahan hasil perikanan yang sederhana serta Nelayan memiliki peraturan tertulis yang dibuat oleh kelompok nelayan yang dikomandoi oleh panglima laot untuk mengelola Sumber Daya Pesisir.
2. Dinamika sosial budaya masyarakat pesisir, kepemimpinan informal Keragaan nelayan, kualitas program pemberdayaan, kompetensi fasilitator, dan kualitas pendukung memiliki pengaruh positif yang nyata terhadap perilaku nelayan. Dinamika sosial budaya dan kualitas program pemberdayaan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan meskipun pengaruhnya tidak nyata tetapi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir yang berdampak bagi kehidupan. Kondisi Sumber Daya Pesisir memiliki pengaruh positif yang nyata terhadap kesejahteraan.
3. Pengembangan masyarakat pesisir dalam penelitian mengarah pada meningkatnya kualitas hidup nelayan dari keluarganya melalui pengelolaan Sumber Daya Pesisir secara terpadu dengan mengakomodasi kepentingan ekologis, sosial budaya, dan ekonomi yang ditekankan pada mekanisme kerja sistem penyuluhan, sistem sosial, dan sistem lingkungan fisik.

Sinergitas antara pemerintah, swasta, dan pihak terkait diperlukan guna mengembangkan masyarakat pesisir yang mampu memelihara kondisi Sumber Daya Pesisir bagi kesejahteraan.

5.2 Saran

1. Pengembangan perilaku masyarakat pesisir perlu diinisiasi dari adanya kesadaran masyarakat akan perubahan, selanjutnya diperlukan peran institusi lokal pengelolaan Sumber Daya Pesisir, pemuka masyarakat. peran pemerintahan Kecamatan Samatiga melalui Dinas terkait, pihak swasta, dan LSM sebagai fasilitator perubahan.
2. Penelitian ini merupakan kajian komunitas pesisir di kecamatan Samatiga dalam kaitannya dengan Sumber Daya Pesisir. Model pengembangan masyarakat pesisir yang diperoleh dari hasil penelitian dapat diterapkan pada komunitas pesisir lain dengan modifikasi yang diperlukan sesuai dengan kondisi ekologis/geografi, sosial. dan ekonomi setempat.
3. Untuk lebih meningkatkan Produksi penangkapan dan tingkat pemamfaatan potensi sumber daya perikanan di Kecamatan Sama Tiga, diperlukan focus perencanaan yang tepat terhadap nelayan dengan status sebagai nelayan penuh sehingga sasaran program dan kegiatan proyek akan mencapai keberhasilan yang maksimal. Bagi nelayan – nelayan sambilan diperlukan peningkatan keterampilan tambahan melalui kegiatan pelatihan dan pemagangan baik menyangkut tekhnik penangkapan maupun aspek – aspek manajemen pemasaran dan pengolahan pasca panen.

DAFTAR PUSTAKA

- .,1999, *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, LiSPI berkerjasama dengan Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP, Jakarta.
- .,*Et. al.*, 2001, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pn. Pradnya Paramita, Jakarta.
- .,2000, *Pengembangan dan Pembinaan Masyarakat Pesisir*, LISPI, Jakarta.
- .,2001, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- .,2003, *Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Anggoro, S., 2004, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat*, MSDP, UNDIP, Semarang.
- Anggoro, S., 2004, *Metode Solusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Laut*, MSDP, UNDIP, Semarang.
- Anggoro, S., 2004, *Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah*, MSDP, UNDIP, Semarang.
- Arikunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. V, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Budiharsono, S., 2001, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, Pn. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2001, *Pedoman Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir Indonesia*, Biro Kelautanan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Clark, J.,2001 *Coastal Ecosystems Ecological Considerations for Management of the Coastal Zone*, Department the Conservation Foundation 1717 Masschu setts Avenue, N. W. Washington, D.C.

- Dahuri, Sumiati, E 1996, Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau - pulau Kecil, Departemen Perikanan dan Kelautahn, *Modul Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Terpadu*, DirektoratJendral Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Jakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan 2009. Data Perikanan KabupatenAceh Barat Tahun 2009 . Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Ghofar, A., 2004, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*, Cipayung-Bogor.
- Hanson, AJ 2004 Coastal community: International perspectives. Paper presented al the 26th Annual Meeting of the Canadian Commission for UNESCO, St John's Newfoundland, June 6th 1984.
- Hidayat M. M., dan Surochiem As.,..., *Pokok-pokok Strategi Pengembangan Masyarakat Pantai Dalam Mendorong Kemandirian Daerah*, <http://www.hangtuah.ac.id/Baru-depan/Humas/artikel.htm>
- Ife, J. 2005 Community Development: Creeling Community Alternatives – Vision, Analyse and Practice. Melbourne Longman Australia. Pry Ltd.
- Kay, J Alkes ., Alder Smith dalam Ghofar , 2004, *Revitalisasi dan Refungsionalisasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Terumbu Karang dan Mangrove*, Kerjasama Bappeda dengan Universitas Nusa Cendana.
- Keraf, S. A., 2002, *Etika Lingkungan*, Pn. BukuKompas, Jakarta.
- Kusnadi, 2002, *Konflik Sosial Nelayan*, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan, LkiS, Yogyakarta.
- Korten, D.C 2004. People-centred Development. Connecticut: Kumarian Press.
- Kolb, D. 2004. Experiential Learning: Experience as tne Source of Learning and Development. New Jersey: Prentice Hall.
- Lippitt, R., Watson, J., dan Westley, B. 2002. Planned Change: A Comparative Study of Principle and Techniques. Willard B. Spacing (editor) New York: Harcourt Brace and World, Inc
- Nikijuluw, P, dalam Dietrich 2001, *Pengelolaan Kawasan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat*; Sebuah Catatan Pengalaman, Kupang.

- O'Connor, J. 2001. Capitalism, nature, socialism: A theoretical introduction. *Journal of Capitalism, Nature, Socialism* 1 (1):11-38
- Oppenheim, AN. 2006. *Questionnaire Design and Attitude Measurement*. London: Heinemann.
- Rothman, J. 2004. Approaches to community intervention. Dalam *Strategies to Community Intervention*. Editor: John E. Tropman, John E. Echolds, dan Jack Rothman. Colombia: Colombia University Press Copyright NCSW.
- Satria, A., 2002, *Karakteristik Sistem Sosial Masyarakat Pesisir*, Kendari.
- Whitten, T., Soeriaatmadja, RE., dan Afiff, S.A. 2001. *Ekologi Jawa dan Bali (The Ecology of Jawa and Bali)* Seri Ekologi Indonesia Jilid II, alih bahasa Kartika Sari, Tyas Budi Utami, dan Agus Widyantoro. Canada: Dalhousie University.

